CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Semester 1 Tahun 2025

BIMBINGAN MASYARAKAT Buddha

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT

Jalan H. A. M. Pattana Endeng Nomor 46 Mamuju 91511
Telp. (0426) 2703178, website : www.sulbar.kemenag.go.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT
Jalan H.A.M. Pattana Endeng Nomor 46 Mamuju 91511
Telepon (0426) 2703178; Faksimile (0426) 2703179
Website : www.sulbar.kemenag.go.id

Nomor : B-666/Kw.31/9/KU.02.1/07/2025 17 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Periode Semester I Tahun Anggaran 2025

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju
Jalan Martadinata,
Mamuju

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Mamuju nomor S-619/KPN.2601/2025 tanggal 12 Juli 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 Tingkat UAKPA Bimbingan Masyakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Sulawesi Barat (664776), sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

Adnan Nota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mamuju 18 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

ADNAN NOTA
NIP 196912311991031024

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : tqiE8Wo2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		1
Pernyataan Tanggung Jawab		2
Ringkasan		3
I.	Laporan Realisasi Anggaran	5
II.	Neraca	6
III.	Laporan Operasional	7
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	8
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	9
	A. Penjelasan Umum	8
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	42
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	48
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	52
VI.	Lampiran dan Daftar	53
	Lampiran A1 Rincian Aset Per 30 Juni 2025	
	Lampiran A2 Informasi Pendapatan Belanja Akrual	

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
Jl. H. A.M. Pattana Endeng No. 46 Mamuju 91511 Telp. (0426) 2703178 , Faksimile (0426)2703179
website : www.kemenag.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2025 semester 1 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Satuan Kerja Bimbingan Masyarakat Buddha (08) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2025 bagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mamuju 18 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

ADNAN NOTA
NIP 196912311991031024

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : w2zx31w0

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : w2zx31w0

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Unit Eselon I Satker Bimbingan Masyarakat Buddha (664776) Periode yang berakhir 31 Desember 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari s.d 30 Juni 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp 0** atau mencapai **0,00** persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp 0**.

Realisasi Belanja Negara pada pada semester 2 TA 2024 adalah sebesar **Rp 760.870.000** atau mencapai **70.04 %** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp 268.836.345.**

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Asset, kewajiban, dan ekuitas pada Januari s.d 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar **Rp 31.900.400,-** yang terdiri dari Aset lain-lain sebesar **Rp 8,226,880,** Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar **Rp 0,** Aset Tetap (neto) sebesar **Rp 21.684.400,-** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp 0,-** Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp 10.019.000** dan **Rp 31.900.000,-**

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defsit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus defsit -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar **Rp. 0,** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp. 273.769.045,-** sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp (273.769.045,-)**. Surplus Kegiatan Non Operasional dan surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp0,-** dan deficit sebesar **Rp 0** sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar **Rp (273.769.045,-).**

1. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar **Rp 26.814.100,-** dikurangi defisit-LO sebesar **Rp (273.769.045,-)** dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai **Rp 0,-** sementara kenaikan/penurunan ekuitas adalah (2,758,150) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp 268.836.345,-** sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai **Rp 21.881.400**

1. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
SATUAN KERJA BIMAS BUDDHA (664776)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% Thn	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI	Angg	REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**-**	**-**	**-**
BELANJA	**B.2.**				
Belanja Pegawai	B.3	72.000.000	15.000.000	20.83	30.000.000
Belanja Barang	B.4	683.870.000	253.836.345	37.12	306.388.505
Belanja Modal	B.5	5.000.000	0	0	10.000.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		**760.870.000**	**268.836.345**	**35.33**	**346.388.505**

Mamuju, 18 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

ADNAN NOTA
NIP 96912311991031024

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : O8gFwfeL

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : O8gFwfeL

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : O8gFwfeL

G. 1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 48 tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Dr.H.Syamsul.S.Ag.,M.Pd.

Pejabat Pembuat Komitmen : Petrus Tandilodang, SS

Bendahara Pengeluaran : Rahmawati,SE

Operator Pelaporan dan Piutang : Feri Winarsih, S.Pd.B

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : O8gFwfeL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
SATUAN KERJA BIMAS BUDDHA (664776)
NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2025 –SEMESTER 1

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	10.000.000	10.000.000
Persediaan	C.2	216.000	216.000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.3	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.4	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.5	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.8	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.9	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.10	-	-
Barang Komsumsi	C.11	-	-
Jumlah Aset Lancar		10.216.000	10.216.000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	571,424,240	571,424,240
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	4,550,000	4.550.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(554,289,840)	(549,160,140)
Jumlah Aset Tetap		**21.684.400**	**26.814.100**
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21		-
Aset Lain-Lain	C.22	8.226.880	8,226,880
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(8.226.880)	(8.226.880)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		**31.900.400**	**26.814.100**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang yang belum ditagihkan	C.24	19.000	19.000.000
Uang Muka dari KPPN	C.25	10.000.000	10.000.000
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		**10.019.000**	10.019.000
EKUITAS	C.28	21.881.400	26.814.100
Jumlah Ekuitas		**21.881.400**	**26.814.100**
		21.881.400	26.814.100
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**31.900.400**	**26.814.100**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 2iETBhnA

Mamuju. 18 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

ADNAN NOTA
NIP 196912311991031024

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 2iETBhnA

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 2iETBhnA

G. 1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 48 tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Dr.H.Syamsul.S.Ag.,M.Pd.

Pejabat Pembuat Komitmen : Petrus Tandilodang, SS

Bendahara Pengeluaran : Rahmawati,SE

Operator Pelaporan dan Piutang : Feri Winarsih, S.Pd.B

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 2iETBhnA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
SATUAN KERJA BIMAS BUDDHA (664776)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		**0**	**0**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	15,000,000	30,000,000
Beban Persediaan	D.3	1,012,000	1,311,500
Beban Barang dan Jasa	D.4	82,245,690	144,940,190
Beban Pemeliharaan	D.5	15,736,655	22,073,630
Beban Perjalanan Dinas	D.6	6,640,000	117,383,185
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	148,004,000	20,000,000
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	5,129,700	7,628,450
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
JUMLAH BEBAN		**273,769,045**	**343,336,955**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(273,769,045)**	**(343,336,955)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Beban Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(273,769,045)**	**(343,336,955)**
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA			
SURPLUS/DEFISIT LO		**(273,769,045)**	**(343,336,955)**

Mamuju. 18 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,

ADNAN NOTA

NIP 196912311991031024

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : RR2C7UXq

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : RR2C7UXq

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : RR2C7UXq

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : RR2C7UXq

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
SATUAN KERJA BIMAS BUDDHA (664776)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	26,814,100	29,572,250
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(273,769,045)	**(343,336,955)**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E,3,7	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	268,836,345	346,388,505
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(4,932,700)	(3,051,550)
EKUITAS AKHIR	E.5	**21,881,400**	**32,623,800**

Mamuju. 18 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

ADNAN NOTA
NIP 96912311991031024

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : gGX3miC3

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Agama Satker Bimbingan Masyarakat Buddha (664776)

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Dibentuk Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Untuk Meningkatkan Pelayanan Serta Pembinaan Kehidupan Beragama Dipandang Perlu Membentuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Yang Didasarkan Pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2005. Sebagai Instansi Vertikal Di Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Berkedudukan Di Mamuju Mempunyai Tugas Melaksanakan Bimbingan Dan Pelayanan Di Bidang Kehidupan Beragama Di Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Kebijakan Menteri Agama Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Berlokasi Di Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Di Jln. H.A.M. Pattana Endeng No. 46 Mamuju.Untuk Mewujudkan Tujuan Diatas Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Surat Keputusan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Berkomitmen Dengan Visi " ***Terwujudnya Masyarakat Sulawesi Barat Yang Religius, Rukun, Santun, Cerdas Dan Mala'bi".***

Untuk Mewujudkan Visi Tersebut Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Melakukan Beberapa Langkah-Langkah Strategis Atau Misi Sebagai Berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama,pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan; dan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk
8. 8 (delapan) tujuan dengan sasarannya masing-masing berikut indikatornya guna memudahkan realisasi dan pengukuran capaiannya, yaitu :
   a. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
   b. pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
   c. pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
   d. peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi keagamaan;
   e. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
   f. peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
   g. peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan;dan
   h. peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama pendidikan

agama dan pendidikan keagamaan.

Sementara Tujuan Jangka Panjang Pelayanan Di Bidang Keagamaan Hendak Ingin Dicapai Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Sehingga Terwujudnya Masyarakat Sulawesi Barat Yang Religius, Rukun, Santun, Cerdas Dan *Mala'bi* Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan Mempertimbangkan Kondisi, Potensi, Dan Permasalahan Yang Ada Dan Sinerjik Dengan Visi, Misi Dan Tujuan Jangka Panjang Yang Telah Ditentukan Maka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawsi Barat Menetapkan Sasaran Strategi Yang Hendak Di Capai Dalam Periode 2020-2024 Dengan Skala Bidang Perioritas Yaitu:

1. Pelayanan Dan Kehidupan Beragama.
2. Pemahaman Dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama.
3. Pelayanan Pendidikan Agama Dan Lembaga–Lembaga Sosial Keagamaan.
4. Tata Kelola Administrasi Secara Profesionalisme

A.2.Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yatu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Ukuran

Dasar Ukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang merupakan entitas pelaporan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KU
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi bersadarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Beban

4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

  a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

  Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) . Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut : Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian

Aset Tetap

a. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara kegunaanya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya

Aset Tetap Secara Premanen

b. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengeloaan BMN dan BMD

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
   Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
   Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
   Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNBP	0	0
Jumlah Pendapatan	**0**	**0**
Belanja		
Belanja Pegawai	72,000,000	72.000.000
Belanja Barang	683.870.000	683.870.000
Belanja Modal	5.000.000	5.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	**760.870,000**	**760.870,000**

Realisasi Pendapatan Rp 0

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp 0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0. Pendapatan ini dari tahun sebelumnya adanya pengalihan pembayaran gaji pegawai satuan kerja yang lain dengan rincian sebagai berikut

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan Pajak	0	0	0,00
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0,00

Realisasi Penerimaan Pajak sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 0,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan Pajak	0	0	0,00
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0,00

Realisasi Penerimaan Pajak Rp0,-

B. 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penerimaan Pajak TA TA 2025 sebesar 0,00 dari TA 2024 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	TA 2025	TA 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	0,00
Jumlah	**0**	**0**	0,00

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi TA.2025	Realisasi TA 2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
Jumlah	-		
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp0

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 sebesar 0,00 dari TA 2024

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	TA 2025	TA 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	-	0,00
Jumlah	**0**	**0**	0,00

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran		
	TA 2025	TA 2024	%
Pendapatan Denda Penyelesaiaan Pekerjaan Pemerint	Rp -	Rp -	-
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Tahun Lalu	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	-

B.2 Realisasi Belanja

Realisasi Belanja
Rp. 494,524,315

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp 268.836.345 atau 35.33 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 760.870.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2024

Uraian	Rincian Anggaran Dan Realisasi		
	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Terhdp % Anggaran
Belanja Pegawai	72.000.000	15.000.000	41.67%
Belanja Barang	683.870.000	253.836.345	74.27%
Belanja Modal	5,000,000	0	0%
Jumlah	**760.870,000**	**268.836.345**	**35.33%**

Komposisi Anggaran dan realisasi belanja dapat di lihat dalam grafik berikut ini:

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 mengalami **Penurunan sebesar (35%)** persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Juni 2025. Selain itu disebabkan adanya penurunan secara nasional karena perolehan Dipa Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI sehingga dalam penyebarannya anggaran Dipa Bimas Buddha setiap Provinsi Mengalami Penurunan.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2025	%
Belanja Pegawai	15.000.000	30.000.000	**20.83%**
Belanja Barang	**253.836.345**	**306.388.505**	**37.12%**
Belanja Modal	0	15.000.000	(0,00)
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Jumlah Belanja	**760.870.000**	**268.836.345**	

Belanja Pegawai Rp 72.000.000,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 15.000.000,-** dan **Rp 30.000.000.-** Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan **(20.84%)** persen dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain adanya peralihan pembayaran Gaji dan tunjangan dan semua yang melekat dalam akun tersebut dibayarkan oleh Sekjen, adanya 2 orang Penyuluh Non PNS yang diputus Kontraknya Kerjannya selain Penyuluh Non PNS yang terdata dalam data BKN tetap dibayarkan serta adanya penurunan Penerimaan Dipa dipa Bimas Buddha pada Tahun 2025.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	%
Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	5.000.000	20.000.000	20.83%
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	10,000,000	10,000,000	50.00%
Jumlah	15.000.000	82.000.000	100%

Belanja Barang Rp 683.870.000,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 253.836.345 dan Rp . 306,388,505 Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan 37.15**%** dibandingkan tahun 2024.

Walaupun anggaran tahun 2025 untuk belanja barang lebih kecil dibandingkan tahun 2024.

Hal ini disebabkan karena penurunan secara nasional di ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia

Perbandingan Belanja Barang
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Belanja Keperluan Perkantoran	34.947.690	34,000,190
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	16.200.000	18,050,000
Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk Uang	31.080.000	67,000,000
Belanja Barang Persediaan Komsumsi	1.228.000	1,991,500
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	.15.736.655	22,073,630
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.640.000	5,940,000
Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang	148.004.000	20,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	26,519,380
Belanja Jasa Profesi	0	22,000,000
Belanja Bahan	0	2,490,000
Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,400,000
Jumlah Belanja Kotor	**253.836.345**	**346.388.505**
Pengembalian Belanja	-	-
Jumlah Belanja	**253.836.345**	**346.388.505**

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :
Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp 0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Belanja Modal Rp 5.000.000-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.5.000.000 dan Rp 10.000.000 Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Mengalami Penurunan sebesar 0% dibandingkan TA 2025 sementara Tahun 2024 mencapai 100%.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2025 dan TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	10.000.000	100,00
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringar	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**10.000.000**	**0,00**
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**0**	**10.000.000**	**100,00**

Belanja Modal Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
Ta 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	**0**	**0**	0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 10.000.000,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing- masing sebesar Rp 5.000.000 dan Rp 10.000.000 Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 50.00 % di bandingkan tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	5.000.000	10.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**0,00**
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**0,00**
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi di Jaringan TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-		0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	**0,00**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	**0,00**

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya	-		0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	**0,00**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	**0,00**

Belanja Bantuan Sosial Rp 0

B.5.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 148.004.000 dan Rp 20.000.000 Realisasi tersebut pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 100.00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	0,00
	-		0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	**0,00**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	**0,00**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar Rp 0,-

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Satker Bimas Buddha, per 30 Juni Tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 10.216.000,-** dan **Rp. 0,-**. Aset Lancar merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijua dalam waktu 12 bulan sejak tertanggal pelaporan.

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp10.000.000,-

C. 1. 1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara pertanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satker Bimas Buddha per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp10.000.000,-** dan **Rp. 0.**

dengan rincian sebagai berikut : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

TA 2025 dan 2024

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	0	0
Bank BRI Cabang Mamuju	0	0
Jumlah	**0**	**0**

Kas di bendahara Penerimaan Rp0

C. 1. 2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi

bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	0	0
Bank BRI CABANG MAMUJU	0	0
Jumlah	**0**	**0**

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.1. 3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tidak terdapat Pada Satker Bimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat . Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 202
Kas Lainnya di bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	**0**	**0**

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.1. 4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 30 juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Piutang PNBP	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	**0**	**0**

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0

C.1. 5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tidak terdapat Pada Satker Bimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Nama	Tahun 2025	Tahun 2024
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		**0**	**0**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) tidak terdapat Pada Satker Bimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		**0**	**0**

C.1.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jk. Pendek Rp0

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar tidak terdapat Pada Satker Bimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Pendek

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak tertagih	-	0%	-

C.1.8 Beban Di bayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka Rp0

Beban Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 dan 2024 masing - masing adalah sebesar **Rp 0** dan **Rp 0**. Beban Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar Dimuka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Satker Bimas Buddha per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Dibayar Dimuka TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah	**0**	**0**

C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan Hak Pemerintah atas layanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Satker Bimas Buddha per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 0** dan **Rp 0**, dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Jasa Pelatihan	0	0
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	0
Jumlah	**0**	**0**

C.1.10 Persediaan

Persediaan Rp 216.000,-

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 216.0000,-** dan **Rp. 0**,-

Rincian Persedian TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	216.000	0
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	**0**	**0**

Semua Jenis Persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap Rp. **21.684.400,-**

B. 2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Satker Bimas Buddha per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 26,814,100,-** dan **Rp 26.814.100,-**. Aset Tetap merupakan asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Satker Bimas Buddha berupa Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah Rp 0,-

C. 2. 1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah tidak terdapat pada Satker Bimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat .

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	-
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Mutasi Kurang :	
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025-	
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

C.2. 2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp 571,424,240

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Perlatan dan Mesin Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Satker Bimas Buddha per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 571,424,240,-** dan **Rp 571,424,240,-** . Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	21,684,400
Peralatan dan Mesin	571,424,240
Aset Tetap Lainnya	4.550.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	(554.289.840)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	21.684.400

Gedung dan Bangunan Rp 0

C.2. 3 Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat Nilai Gedung dan Bangunan pada satker Bimas Buddha Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat per 30 Juni 2025 dan 2024.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.2. 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tidak terdapat Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Satker Bimas Buddha Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat per 30 Juni 2025 dan 2024.

Aset Tetap Lainnya Rp 4.550.000

C.2. 5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam, peralatan dan mesin, Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024023 masing-masing adalah sebesar **Rp 4.550.000** dan **Rp 4.550.000** dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	-
Aset tetap lainnya	4.550.000
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	(4.550.000)

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.2. 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Satker Bimas Buddha per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 0** dan **Rp 0**.

Akumulasi Penyusutan Aset Rp(8.226.880)

C.2. 7 Akumulasi Penyusutan Aset

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Satker Bimas

Buddha per 30 Juni 2025 dan 2024 masing – masing adalah sebesar **Rp (8.226.880)** dan **Rp (8.226.880)** Akumulasi Penyusutan Aset merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain bentuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset per 30 Juni 2025 dan 2024 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	571,424,240	(554.289.840	21.684.400
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	8,226,880	-	-
Akumulasi Penyusutan		(8,226,880)	-	-

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.3 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Rp0

Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Satker Bimas Buddha 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 0** dan **Rp 0**. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.3. 1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp 0

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Satker Bimas Buddha per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 0** dan **Rp 0**. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		**0**	**0**

C.3. 2 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran Rp 0

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian TPA untuk masing -masing debitur adalah sebagi berikut :

Rincian Piutang TPA TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		**0**	**0**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp 0

C.3. 3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Satker Bimas Buddha per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagi berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Panjang TA 2025

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Tagihan TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagh	-	0%	-

Aset Lainnya Rp 4,550.000

C.4 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Satker Bimas Buddha per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 4,550,000** dan **Rp 4,550,000**

Aset Tak Berwujud Rp 0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 0** dan **Rp 0**.

Aset Tak Berwujud merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak memiliki wujud fisik.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	-
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Saldo per 30 Juni 2025	-
Amortisasi s.d 30 Juni 2025	-

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	-	-
2	-	-
	Jumlah	-

Aset Lain – lain Rp 8,226,880

C.4.2. Aset Lain -lain

Aset Lain – lain per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 8,226,880** dan **Rp 8,226,880**. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Satker Bimas Buddha .

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan30 Juni 2025		-
Mutasi tambah :		
Reklasifikasi dari Aset Tetap		-
Mutasi kurang :		
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan		-
Penghapusan BMN		-
Saldo per 30 Juni 2025		-
Amortisasi s.d 30 Juni 2025	-	8.226.880
Nilai Buku per 31 Desember 2024		8.226.880

Rincian Aset Lain – lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp(8,228,880)

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp (8,228,880)** dan **Rp (8,228,880).**

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi asset lainnya adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2025

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1	-	-	-	-
	Jumlah		-	- -
	B Aset Lain-lain		- 8.228.880	- 8.228.880
	Jumlah		-	- -
	Total		- 8.228.880	- 8.228.880

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Rp 10.019.000

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar atas jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Satker Bimas Buddha per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp10.019.000,-** dan **Rp 0**.

Kewajiban Jangka Pendek bimas Buddha Buddha terdiri dari Utang yang Belum ditagihkan sebesar Rp. 19.000 pada akun 218111 hal ini di karenakan ada belanja digipei pada Market plain pada aplikasi KPPN yang diwajibkan belanja diaplikasi tersebut, sementara satker Bimas Buddha Prov Sulbar belanja pada Tanggal 30 Juni 2025 secara GU sehingga pertanggung Jawabannya pada Bulan Juli tahun 2025

Sementara Uang Muka dari KPPN sebesar Rp. 10.000.000

Uang Muka dari KPPN Rp 10.000.000,-

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Buddha per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 10.000.000,-** dan **Rp 0**, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 0

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Buddha per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 0**,

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Satker Bimas Buddha per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	-
2	Potongan Pajak yang belum disetor	-
3	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-

Total	-

Pendapatan Jasa Giro merupakan bunga bank pada rekening penampungan lainnya yang belum terdaftar pada ***Treasury National Pooling (TNP)*** dan belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

Potongan Pajak merupakan pungutan pajak bendahara pengeluaran atas transaksi Uang Persediaan yang belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

Tidak ada Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya yang belum dibayarkan kepada para pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Satker Bimas Buddha .

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Buddha per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 0** dan **Rp0**. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang / jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Penapatan Diterima di Muka TA 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
Jumlah	

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar Buddha per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**, merupakan kewajiban pemerintah kepada Pihak Ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024
Belanja Pegawai yang Maih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas Rp 26.814.100

C.7. Ekuitas

Ekuitas Buddha per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 26.814.100,-** dan **Rp 29.572.250** ,- Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan

selisih antara asset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Pendapatan Perpajakan *Rp 0*

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada Buddha per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0,00%
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	0	0	0,00%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0,00%
Pendapatan BPHTB	0	0	0,00%
Pendapatan Cukai	0	0	0,00%
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0,00%
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0,00%
Pendapatan Bea Keluar			
Jumlah	**0**	**0**	**0,00%**

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan dari penjualan pengelolaan BMN dan Iuran Badan usaha, pendapatan dan Pendapatan Lain-lain yang merupakan pengembalian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp. 0

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada Buddha per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh .

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester 1
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-
Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah	-	-	-
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana	-	-	-
jumlah			

Beban Pegawai Rp 15.000.000,-

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Buddha per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 15.000.000,-** dan **Rp 30.000.000,-** **.** Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 50% persen sama dengan Tahun 2024 di karenakan gaji pegawai sudah tidak melekat dengan dipan bimas Buddha Provinsi Sulawesi Barat tetapi ke sekjen, Sehingga mengalami penurunan.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	%
Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	10.000.000	10.000.000	0,00
Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	5.000.000	20.000.000	0,00
Beban Gaji Pokok PNS	0	0	0,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	0,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0,00
Beban Tunj. Anak PNS	0	0	0,00
Jumlah Beban	**15.000.000**	**30.000.000**	**0,00**

Beban Persediaan Rp 1,012.000

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.012.000 dan Rp 1.311.500 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang- barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 22.83% persen dibandingkan dengan Tahun 2024

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Persediaan 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	1.012.000	1.311.500	22..83
Beban Persediaan pita, materai dan leges	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Beban	**1.012.000**	**1.311.500**	**22.83**

Beban Barang dan Jasa Rp 82.246.690

D.5 Beban Barang Dan Jasa

Jumlah Beban Jasa 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 82.246.690,-** dan **Rp 114.940.190** Beban Jasa terdiri dari Belanja jasa Profesi

Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami Penurunan sebesar 43.25 % persen dibandingkan dengan Tahun 2024 Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	0	0	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	0,00
Beban barang Operasional-Penanganan P. Covid 19	0	0	0,00
Beban Bahan	0	0	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	0	0	0,00
Beban Jasa Profesi	208,913,140	22,000,000	01.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
Beban Brg Pemberian Bantuan Operasional dlm Bentuk Uang	0	0	0,00
Beban sewa	0	0	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Beban	208,913,140	22,000,000	**0,00**

Beban Pemeliharaan 15.736.655

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar **15.736.655** dan **Rp 22.073.630**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 28.70 % persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya beban terkait asuransi pesawat yang memiliki nilai cukup besarRincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban PemeliharaanTA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.736.655	22.073.630	28.70
Jumlah Beban	**15.736.655**	**22.073.630**	28.70

Beban Perjalanan Dinas Rp. **6.640.000**

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 6.640.000** dan **Rp 117.383.185** Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami Kenaikan/Penurunan sebesar 94.34% persen disebabkan oleh. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Perjalanan Biasa	6.640.000	84,923,805	(78.22)
Beban Perjalanan Dinas luar kota	0	26,519,380	(12.12)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	5,940,000	(2,17)
Jumlah Beban	**6.640.000**	**117.383.185**	**94.34%**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp 148.004.000

D.8 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 148.004.000**dan **Rp 20.000.000.** Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 64.00% dibandingkan dengan Tahun 2024

disebabkan oleh Bantuan Rehab/Renov/Pembangunan Rumah Ibadah dan Bantuan Pembuatan Sertifikat Rumah ibadah Agama Buddha.

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 adalah sebagai berikut Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk Uang	0	0	0,00
Beban Gedung dan Bangunan untuk di serahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang	148.004.000	20.000.000	(64,00)
Jumlah Beban	**148.004.000**	**20.000.000**	**(64,00)**

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar **Rp0** dan **Rp0.** Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.
Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	0	0	0,00
Jumlah Beban	**0**	**0**	**0,00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp (8,226,880)

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp (8,226,880) dan Rp (8,226,880)

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU	0	0	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	**0**	**0**	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	(8,226,880)	(8,226,880)	#VALUE!
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BL	0	0	0,00
Jumlah Penyusutan	(8,226,880)	(8,226,880)	
Jumlah Amortisasi	**0**	**0**	0,00
Jumlah	**(8,226,880)**	**(8,226,880)**	#VALUE!

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNBP	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0,00
Jumlah Beban	**0**	**0**	**0,00**

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar *Rp 0*

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0;

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TH. 2025	TH, 2024	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	0	0,00
Jumlah Beban	**0**	**0**	0,00

Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang *Rp0*

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

(dalam rupiah)

Uraian	TH. 2025	TH, 2024	%
	-	0	0,00
Jumlah Beban	**0**	**0**	0

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainny

Surplus (devisit) dari kegiatan Non Operasional lainnya Rp. 0

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pad 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

(dalam rupiah)

Uraian	TH. 2024	TH, 2023	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	0	0,00
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran yang lalu	-	0	0,00
Beban Barang Tahun Anggaran yang lalu	-	0	0,00
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	0	0,00
Jumlah Beban	**0**	**0**	0

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp 0 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	TH. 2025	TH, 2024	%
Pendapatan PNBP	-	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	-	0	0,00
Beban Persediaan	-	0	0,00
Jumlah Beban	**0**	**0**	0,00

Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 *Rp. 0*

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pademi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TH. 2025	TH, 2024	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	0	0,00
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	0	0,00
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	0	0,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	0	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	0	0,00
Jumlah Beban	**0**	**0**	0,00

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 Beberapa akun tidak disajikan secara khusus karena pada awal penanganan pandemi belum menggunakan akun khusus, dan telah dipertanggungjawabkan bendahara dengan SPM/SP2D GUP tanggal 5 April 2020 senilai Rp 0 , sehingga tidak teridentifikasi oleh sistem akuntansi

Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional Rp.0

D.17 Catatan Penting Lainnya laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp 26.814.100

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 26.814.100** dan **Rp 29.572.250**

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO Rp (273.769.045)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2025 masing-masing adalah deficit sebesar (**Rp *273.769.045)*** dan (**Rp 343.336.955)).** Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/deficit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp0

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp 0**.

E.4. Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas Rp. 0

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp 0**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp 0

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2024v

(dalam rupiah)

No	Jenis Persediaan	Koreksi
1	Koreksi nilai persediaan	-
	Jumlah	-

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp Rp 0

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainya

(dalam rup

No	Koreksi atas reklasifikasi	Koreksi	
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-	
	Jumlah	-	

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Rp0

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah)

No	Selisih Revaluasi	Koreksi
1	Ekuitas Transaksi Lainnya	-
2	Revaluasi Aset Tetap	-
	Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp.0

E.4.5. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

Koreksi ini Terdapat Kesalahan Pengkodean pada Barang Milik Negara, sehingga perlu dilakukan koreksi

No	Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Koreksi
1	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
	Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

No	Jenis Koreksi	Koreksi
1	Koreksi Lain-lain	-
	Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp 268.836.345

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp.268.836.345 dan Rp.346.388.550 mengalami penurunan 22.39 % dibandingkan tahun 2024. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

No	Jenis Koreksi	Nilai
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	0
2	Diterima dari Entitas Lain	
3	Transfer Keluar	
4	Transfer Masuk	
5	Pengesahan Hibah Langsung	
6	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
	Jumlah	-

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL) / ditagihkan ke entitas lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DKEL sebesar Rp 0 sedangkan DDEL sebesar minus Rp 0

E.5.2 Transfer Masuk/Trasfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp0 terdiri dari

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
		-
	Jumlah	-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp 0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
		-
	Jumlah	-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp 0 yang akan diterima sepanjang tahun 2024 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas.
Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp 0.
Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut

Pemberi Hibah	bentuk Hibah	Nilai
		-
Total Pengesahan		
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung		
	Jumlah	-

Ekuitas Akhir Rp
21.881.400

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 21.881.400 dan Rp. 32.623.800

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. Pengungkapan Penting lainnya

F.1. Kejadian-Kejadian setelah tanggal neraca

F.2. Pengungkapan penting Lainnya

G. 1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 05 tanggal 8 Januari 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. H. Adnan Nota, MA

Pejabat Pembuat Komitmen : Petrus Tandilodang, SS

Bendahara Pengeluaran : Raehan, S.Sos.

Operator Pelaporan dan Piutang : Feri Winarsih, S.Pd.B

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

ESELON I : (08) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

WILAYAH/PROVINSI : (3400) SULAWESI BARAT

SATUAN KERJA : (664776) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT

Tgl Data : 18/07/25 1:05 PM

Tgl Cetak : 18/07/25 7:50 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	15,000,000	30,000,000	(15,000,000)	(50)
Beban Persediaan	1,012,000	1,311,500	(299,500)	(22.836)
Beban Barang dan Jasa	82,246,690	144,940,190	(62,693,500)	(43.255)
Beban Pemeliharaan	15,736,655	22,073,630	(6,336,975)	(28.708)
Beban Perjalanan Dinas	6,640,000	117,383,185	(110,743,185)	(94.343)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	148,004,000	20,000,000	128,004,000	640.02

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : HENVD9Hv

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(025) KEMENTERIAN AGAMA**

ESELON I : **(08) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA**

WILAYAH/PROVINSI : **(3400) SULAWESI BARAT**

SATUAN KERJA : **(664776) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT**

Tgl Data : 18/07/25 1:05 PM

Tgl Cetak : 18/07/25 7:50 PM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5,129,700	7,628,450	(2,498,750)	(32.756)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	273,769,045	343,336,955	(69,567,910)	(20.262)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(273,769,045)	(343,336,955)	69,567,910	(20.262)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(273,769,045)	(343,336,955)	69,567,910	(20.262)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(273,769,045)	(343,336,955)	69,567,910	(20.262)

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : HENVD9Hv

Keterangan :

FINAL

Mamuju, 18 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ADNAN NOTA

NIP. 196912311991031024

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : HENVD9Hv

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **(025) KEMENTERIAN AGAMA**

UNIT ORGANISASI : **(08) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA**

WILAYAH/PROVINSI : **(3400) SULAWESI BARAT**

SATUAN KERJA : **(664776) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT**

Tgl Data : 18/07/25 6:26 PM

Tgl Cetak : 18/07/25 7:50 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	26,814,100	29,572,250	(2,758,150)	(9.33)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(273,769,045)	(343,336,955)	69,567,910	(20.26)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	268,836,345	346,388,505	(77,552,160)	(22.39)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(4,932,700)	3,051,550	(7,984,250)	(261.65)
EKUITAS AKHIR	21,881,400	32,623,800	(10,742,400)	(32.93)

Keterangan :

FINAL

Mamuju, 18 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ADNAN NOTA

NIP. 196912311991031024

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : H343Be3L

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN AGAMA 025**
ESELON I : **DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA 08**
SATUAN KERJA : **KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT 664776**

Tgl Data : 18/07/25 1:05 PM
Tgl Cetak : 18/07/25 7:51 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	760,870,000	268,836,345	(492,033,655)	35.33	494,550,000	346,388,505	(148,161,495)	70.04
1. Belanja Pegawai	72,000,000	15,000,000	(57,000,000)	20.83	72,000,000	30,000,000	(42,000,000)	41.67
2. Belanja Barang	683,870,000	253,836,345	(430,033,655)	37.12	412,550,000	306,388,505	(106,161,495)	74.27
3. Belanja Modal	5,000,000	0	(5,000,000)	0.00	10,000,000	10,000,000	0	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : Da7N3hl1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN AGAMA 025**
ESELON I : **DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA 08**
SATUAN KERJA : **KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT 664776**

Tgl Data : 18/07/25 1:05 PM
Tgl Cetak : 18/07/25 7:51 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**760,870,000**	**268,836,345**	**(492,033,655)**	**35.33**	**494,550,000**	**346,388,505**	**(148,161,495)**	**70.04**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
FINAL

Mamuju, 18 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ADNAN NOTA
NIP. 196912311991031024

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : Da7N3hl1

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **(025) KEMENTERIAN AGAMA**

UNIT ORGANISASI : **(08) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA**

WILAYAH/PROVINSI : **(3400) SULAWESI BARAT**

SATUAN KERJA : **(664776) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT**

Tgl Data : 18/07/25 1:05 PM

Tgl Cetak : 18/07/25 7:51 PM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	10,000,000	0	10,000,000	0.00
Persediaan	216,000	0	216,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	**10,216,000**	**0**	**10,216,000**	
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	571,424,240	571,424,240	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	4,550,000	4,550,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(554,289,840)	(549,160,140)	(5,129,700)	0.93
JUMLAH ASET TETAP	**21,684,400**	**26,814,100**	**(5,129,700)**	**(19.13)**
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	8,226,880	8,226,880	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(8,226,880)	(8,226,880)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	**0**	**0**	**0**	
JUMLAH ASET	**31,900,400**	**26,814,100**	**5,086,300**	**18.97**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Yang Belum Ditagihkan	19,000	0	19,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	10,000,000	0	10,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**10,019,000**	**0**	**10,019,000**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**10,019,000**	**0**	**10,019,000**	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	21,881,400	26,814,100	(4,932,700)	(18.40)
JUMLAH EKUITAS	**21,881,400**	**26,814,100**	**(4,932,700)**	**(18.40)**
JUMLAH EKUITAS	**21,881,400**	**26,814,100**	**(4,932,700)**	**(18.40)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**31,900,400**	**26,814,100**	**5,086,300**	**18.97**

Keterangan :

FINAL

Mamuju, 18 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ADNAN NOTA

NIP. 196912311991031024

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : a0L9p7X3

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (08) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

WILAYAH/PROVINSI : (3400) SULAWESI BARAT

SATUAN KERJA : (664776) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT

Tgl Data : 18/07/25 6:26 PM

Tgl Cetak : 18/07/25 7:52 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	268,836,345
3.0	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	10,000,000	0
3.0	511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	5,000,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	34,947,690	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	16,200,000	0
3.0	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	31,080,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,228,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,736,655	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,640,000	0
3.0	526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	148,004,000	0
JUMLAH			**268,836,345**	**268,836,345**

Keterangan :

FINAL

Mamuju, 18 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ADNAN NOTA

196912311991031024

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : i24LsDa1

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (08) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

WILAYAH/PROVINSI : (3400) SULAWESI BARAT

SATUAN KERJA : (664776) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT

Tgl Data : 18/07/25 1:05 PM

Tgl Cetak : 18/07/25 7:51 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	10,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	216,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	571,424,240	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	4,550,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	554,289,840
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	8,226,880	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	8,226,880
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	19,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	10,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	268,836,345
0.0	391111	Ekuitas	0	26,814,100
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	10,000,000	0
3.0	511522	Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	5,000,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	34,966,690	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	16,200,000	0
3.0	521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	31,080,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,736,655	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6,640,000	0
3.0	526123	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	148,004,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5,129,700	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,012,000	0
JUMLAH			**868,186,165**	**868,186,165**

Keterangan :

FINAL

Mamuju, 18 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ADNAN NOTA

NIP. 196912311991031024

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : EWQhrdbW

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER I TAHUN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (025.08.2.664776) BIMAS BUDDHA KANWIL KEMENAG PROV SULBAR
Kode dan Nama Eselon-1 : (025.08) DITJEN BIMAS BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA
Kode dan Nama K/L : (025) KEMENTERIAN AGAMA

	Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan..Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
	KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Pernyataan Tanggung Jawab	Ada		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	Ada		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	Ada		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	Ada		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	Ada		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	Ada		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	Ada		Ada
	KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	Sama		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
	KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	Sama		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	Sama		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	Sama		Sama
	PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		Tidak	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	Ya		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		Tidak	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		Tidak	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun		Tidak	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		Tidak	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		Tidak	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		Tidak	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan		Tidak	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		Tidak	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		Tidak	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		Tidak	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		Tidak	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		Tidak	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		Tidak	Tidak
	a. Pagu/DIPA		Tidak	Tidak
	b. Estimasi PNBP		Tidak	Tidak
	c. Belanja		Tidak	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		Tidak	Tidak
	e. Pendapatan		Tidak	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		Tidak	Tidak
	g. Kas BLU		Tidak	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		Tidak	Tidak
	i. Kas Hibah		Tidak	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		Tidak	Tidak
	Rekon Internal	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		Tidak	Tidak
	Daftar MONSAKTI	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan		Tidak	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		Tidak	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		Tidak	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		Tidak	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		Tidak	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		Tidak	Tidak

PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		Tidak	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		Tidak	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		Tidak	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	Ya		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	Ya		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	Ya		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	Ya		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	Ya		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	Ya		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	Ya		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		Tidak	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1116xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		Tidak	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		Tidak	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/8/9 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		Tidak	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		Tidak	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/8/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		Tidak	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		Tidak	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		Tidak	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		Tidak	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		Tidak	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/8/9/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-		Tidak	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		Tidak	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker		Tidak	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		Tidak	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		Tidak	Tidak
3	Terdapat akun 526xxx (Belanja Barang BLU)		Tidak	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		Tidak	Tidak
	Terkait Satker BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		Tidak	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring		Tidak	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan		Tidak	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		Tidak	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan		Tidak	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan		Tidak	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		Tidak	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring			Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?			Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah Jurnal manual pada GLP untuk			Ya

	Akun 491428 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada akun 491428 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah			Ya/Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	Ya		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	Ya		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	Ya		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) "Cek LPJ, Rekening	Ya		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya	Ya		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		Tidak	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	ya		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		Tidak	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		Tidak	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (58xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang		Tidak	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		Tidak	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	Ya		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat penurunan saldo yang	Ya		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	Ya		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		Tidak	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	Ya		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	Ya		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		Tidak	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		Tidak	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	ya		Ya
	Contoh : Pengungkapan 361116 senilai Rp161.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai	ya		
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud?	ya		Ya
	PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)			
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		Tidak	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		Tidak	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		Tidak	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		Tidak	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		Tidak	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai		Tidak	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut		Tidak	Ya
	TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		Tidak	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		Tidak	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		Tidak	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		Tidak	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		Tidak	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		Tidak	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :		Tidak	Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)		Tidak	Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	Ya		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	Ya		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	Ya		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?		Tidak	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		Tidak	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	ya		Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 628XXX pada Neraca Percobaan Kas	ya		Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?	tidak		Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	tidak		Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Kerwas dan/atau Memo Harus	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (212212) pada Neraca Percobaan Akrual		tidak	Ya/Tidak

2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (426131/2/3 atau 42492X)		tidak	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual		tidak	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		tidak	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/8)		tidak	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual		tidak	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual		tidak	Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		Tidak	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		Tidak	Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?		Tidak	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun		Tidak	Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA		Tidak	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun		Tidak	Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111828, 1133xx, 165111, dan 186213 pada Saldo		Tidak	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		Tidak	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		Tidak	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111828) pada Neraca Percobaan BLU		Tidak	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		Tidak	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		Tidak	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU		Tidak	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab tarlsi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

Mengetahui
Penyusun LKKL,

(FERI WINARSIH,S.Pd.B)
NIP.198702252025212019

Mamuju, 24 Juli 2025
Penelaah,

(TS. HARYANTO,S.Ag)
NIP.197301072000031002